



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

**Bani Gorik Marzuq Tamma<sup>1)</sup>, Atik Rochaeni<sup>2)</sup>, Bayu Septiansyah<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Pengelolaan perpustakaan yang efektif merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola transportasi yang berkelanjutan, terutama di kawasan wisata seperti Lembang yang menghadapi masalah parkir kronis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus pada kesesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori Riant Nugroho, yang menganalisis empat variabel: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta kecenderungan pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan perpustakaan di Kecamatan Lembang belum berjalan optimal. Terdapat kesenjangan signifikan antara standar regulasi dan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh faktor koordinasi antar instansi yang belum terintegrasi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta tingginya aktivitas parkir liar yang dikelola oleh kelompok masyarakat tanpa izin. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal, serta sosialisasi kebijakan yang lebih intensif dan transparan. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan perpustakaan di Lembang dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Perpustakaan, Dinas Perhubungan, Kualitatif, Lembang.

### Abstract

*Effective parking management is a key element in creating sustainable transportation governance, especially in tourist areas like Lembang which face chronic parking problems. This research aims to analyze the implementation of parking management policies carried out by the West Bandung Regency Transportation Agency, focusing on the congruence between regulations and on-the-ground realities. The method used is descriptive qualitative with Riant Nugroho's theoretical approach, which analyzes four variables: implementation activities and inter-organizational communication, characteristics of the implementing agents, economic-social-political conditions, and*

*the disposition of the implementers. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, supplemented by field observations and documentary studies. The results show that the implementation of parking management policy in Lembang District is not yet optimal. There is a significant gap between regulatory standards and field practices, caused by factors such as a lack of integrated coordination between agencies, limitations in human resources and infrastructure, and a high level of illegal parking activities managed by community groups without permits. This research recommends the need for strengthening cross-sectoral coordination, improving human resource capacity through regular training, a participatory approach involving local communities, as well as more intensive and transparent policy socialization. With the implementation of these recommendations, it is hoped that parking management in Lembang can run in a more orderly, accountable, and sustainable manner.*

**Keywords:** Policy Implementation, Parking Management, Transportation Agency, Qualitative, Lembang.

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan perparkiran yang efektif merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola transportasi yang berkelanjutan, terutama di kawasan wisata seperti Lembang yang menghadapi masalah parkir kronis. Regulasi yang mengatur perparkiran, seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, seharusnya menjadi landasan bagi pengelolaan yang tertib. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi di lapangan.

Kabupaten Bandung Barat, khususnya Kecamatan Lembang, mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat tidak diimbangi dengan kapasitas dan manajemen parkir yang memadai. Hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, parkir liar, dan konflik sosial. Meskipun retribusi parkir seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah, potensinya belum tergarap secara optimal akibat lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, dan praktik pungutan liar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus pada kesesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho, penelitian ini mengkaji empat variabel utama: aktivitas implementasi dan komunikasi

antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta kecenderungan pelaksana.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan efektif, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi masyarakat luas yang merasakan langsung dampak dari pengelolaan parkir yang belum optimal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi ganda, baik secara akademis maupun praktis, dalam upaya menciptakan sistem perparkiran yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analitis mendalam untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan kunci yang meliputi pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat (Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi), Koordinator Parkir Lembang, juru parkir, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Pengumpulan data dilengkapi dengan observasi lapangan terhadap kondisi fasilitas parkir dan aktivitas pengelolaan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan daerah, laporan retribusi, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sementara analisis didasarkan pada teori implementasi kebijakan Riant Nugroho yang mempertimbangkan empat variabel kunci: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta kecenderungan pelaksana.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran menggunakan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho (2023) yang menitikberatkan pada empat variabel utama. Berikut adalah temuan yang dijelaskan melalui kerangka teoritis tersebut:

a) Analisis Berdasarkan Variabel Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Unsur Pelaksana dalam implementasi kebijakan parkir di Kecamatan Lembang melibatkan multi-stakeholder yang kompleks. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Perhubungan bertindak sebagai leading sector, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Resort (Polres) Bandung Barat, pemerintah kecamatan, dan kelurahan. Selain itu, pelaku swasta pengelola parkir dan masyarakat juga terlibat dalam operasional sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan untuk mengalihkan parkir dari badan jalan (on-street) guna kelancaran lalu lintas dan menyediakan fasilitas parkir off-street telah dirumuskan dengan jelas oleh Pemerintah. Namun, dalam praktiknya, terjadi kesenjangan signifikan antara standar formal tersebut dengan implementasi di lapangan. Kendala utama yang menghambat implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran untuk membangun kantung parkir serta kompleksitas birokrasi. Status jalan yang berubah dari kabupaten menjadi provinsi menuntut koordinasi dan mekanisme perizinan yang lebih rumit, sehingga menghambat proses penyediaan fasilitas parkir yang sesuai dengan harapan.

Koordinasi vertikal dalam internal Dinas Perhubungan berjalan cukup terstruktur melalui forum koordinasi mingguan yang memastikan penyelarasan standar dari tingkat dinas hingga pelaksana lapangan. Namun, koordinasi horizontal dengan instansi lain masih mengalami ketimpangan, terlihat dari penanganan yang telah terintegrasi di wilayah Padalarang tetapi belum diterapkan di Lembang. Koordinasi dengan kepolisian khususnya sering mengalami gesekan akibat perbedaan prioritas, dimana kepolisian fokus pada kelancaran lalu lintas sementara pengelola parkir menitikberatkan pada pemenuhan kapasitas tampung kendaraan.

Pada level teknis-operasional, komunikasi dengan pemerintah daerah juga menghadapi kendala implementasi, dimana penanganan

parkir di badan jalan seringkali memerlukan rekayasa dari Polres. Kendala fundamental juga terjadi pada level pelaksana lapangan, dimana juru parkir mengaku tidak mendapatkan SOP tercetak dan hanya mengandalkan pelatihan langsung. Di sisi lain, koordinasi dengan stakeholder swasta belum optimal, ditandai dengan masih banyaknya pengelola parkir swasta yang belum memiliki izin meskipun sosialisasi telah sering dilakukan.

Hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa memang dengan naiknya status jalan yang ada di daerah Kecamatan Lembang yang asalnya dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi mengakibatkan hilangnya kantong-kantong parkir yang berada dalam badan jalan, dan juga tempat parkir yang berada di luar badan jalan hampir tidak ada sama sekali, jika adapun memang hanya sebatas fasilitas tempat makan, minimarket, dan toko-toko lainnya.

b) Analisis Berdasarkan Variabel Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan dimensi kritis yang menentukan kapasitas implementasi kebijakan. Analisis mendalam terhadap dimensi organisasi pelaksana dan sumber daya mengungkap kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perparkiran di Kecamatan Lembang. struktur organisasi pengelolaan perparkiran di Kecamatan Lembang menunjukkan fragmentasi kewenangan yang signifikan. Secara hukum, pengelolaan parkir merupakan kewenangan kabupaten menurut UU No.23 Tahun 2014, dimana parkir on-street seharusnya tidak diperbolehkan dan pengelolaan swasta hanya boleh untuk parkir off-street dengan wajib izin.

Namun dalam praktiknya, terjadi tumpang tindih kewenangan antara multi-instansi seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, yang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan akibat tidak jelasnya otoritas tertinggi. Meskipun SOP telah dibuat khusus untuk parkir on-street dan off-street, dan beberapa titik sampel telah sesuai dengan SOP, implementasinya masih mengalami disparitas penerapan. Kendala koordinasi dengan kepolisian menjadi

penghambat utama, dimana pihak kepolisian sering meminta peniadaan parkir di badan jalan untuk kelancaran lalu lintas. Sementara itu, koordinasi internal dalam Dinas Perhubungan relatif terstruktur melalui forum mingguan yang mendelegasikan pengelolaan parkir kepada tingkat Kasi, Kabid, dan koordinator untuk menjamin penyelarasan standar.

kapasitas SDM pengelolaan perparkiran di Kecamatan Lembang menunjukkan ketimpangan kompetensi yang signifikan antara level perencanaan dan operasional. Meskipun Dinas Perhubungan telah menyelenggarakan program pelatihan minimal satu kali per tahun bekerja sama dengan sekolah kedinasan, pada level juru parkir masih ditemukan keterbatasan pengembangan kapasitas seperti kurangnya panduan tertulis dan ketidakterlibatan dalam pelatihan. Dari segi distribusi beban kerja, para koordinator parkir menghadapi tantangan dalam memenuhi target harian yang dapat mencapai satu juta rupiah, yang sering terganggu oleh faktor eksternal seperti cuaca.

Dalam hal sarana dan prasarana, meskipun telah ada progress pembangunan infrastruktur seperti pemasangan 100 papan tarif parkir baru, level pelaksana masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti seragam yang memadai. Inovasi teknologi telah diimplementasikan melalui aplikasi OM JUKI untuk meningkatkan transparansi dan evaluasi pengelolaan parkir. Potensi ekonomi kawasan Lembang dinilai sangat besar sebagai penyumbang retribusi terbesar, meskipun belum tergarap secara optimal. Sistem pengawasan keuangan dilakukan melalui pemantauan lapangan untuk memastikan kesesuaian retribusi, sementara sistem monitoring dan evaluasi telah mencakup mekanisme reward and punishment dimana petugas berkinerja baik mendapatkan apresiasi dan yang melakukan pelanggaran berat diberikan peringatan langsung.

Saat melakukan observasi di lapangan peneliti masih melihat aktivitas pengelola perparkiran oleh pihak lain seperti karang taruna, orang yang mengatasnamakan RT/RW dan lain-lainnya. Biasanya parkir liar ini terjadi di tempat-tempat yang biasanya bersifat

sementara atau tempat parkir dadakan dan minimarket yang tersebar di daerah Kecamatan Lembang

c) Analisis Berdasarkan Variabel Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan teori Rinat Nugroho, kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel eksternal yang signifikan mempengaruhi implementasi kebijakan. Analisis komprehensif terhadap dimensi lingkungan eksternal mengungkap dinamika kompleks dalam pengelolaan perparkiran di Kecamatan Lembang.

dengan berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan perparkiran di Kecamatan Lembang menghadapi tantangan kompleks yang multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dari perspektif ekonomi, kawasan Lembang secara potensial merupakan penyumbang retribusi terbesar bagi pendapatan daerah mengingat karakteristiknya sebagai kawasan wisata yang menarik banyak pengunjung dan memiliki banyak kawasan swasta. Namun demikian, realisasi penerimaan retribusi parkir masih sangat rendah, yaitu kurang dari 50% dari potensi ideal, karena masih banyaknya pengelola parkir yang belum terdaftar secara resmi meskipun sosialisasi telah dilakukan secara intensif. Faktor ekonomi informal semakin memperumit situasi dengan maraknya pengelolaan parkir oleh karang taruna dan kelompok RT/RW yang merasa memiliki hak atas lahan parkir, meskipun secara perundang-undangan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Pada tataran sosial, terjadi dinamika konflik yang cukup signifikan antara pengelola resmi dengan masyarakat lokal. Masyarakat setempat seringkali mengklaim hak pengelolaan atas lahan parkir yang berada di wilayah RT/RW mereka, bahkan menerapkan tarif yang lebih tinggi dari ketentuan resmi. Respons masyarakat terhadap kebijakan parkir sendiri cukup beragam; di satu sisi mengakui manfaat keberadaan juru parkir dalam memberikan rasa aman bagi kendaraan, di sisi lain masih terdapat keinginan untuk tidak membayar jasa parkir. Menyikapi kompleksitas ini, Dinas terkait mengambil pendekatan pembinaan represif dengan melakukan

pendataan melalui aplikasi OM JUKI dan pemberian legalitas kepada juru parkir liar melalui seragam dan karcis resmi.

Dukungan politik dan regulasi tampaknya cukup memadai dengan adanya komitmen anggaran dari DPRD untuk penataan parkir di semua kecamatan. Intervensi politik langsung terbilang minimal, meskipun terdapat sedikit gangguan dari kelompok-kelompok lokal. Secara regulasi, sedang dirancang peraturan daerah baru yang akan mengatur pendaftaran pengelolaan parkir oleh pengusaha maupun masyarakat pemilik lahan, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi. Namun demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi intensif antar sektor dan pendekatan yang komprehensif untuk menjawab akar permasalahan yang ada di lapangan.

Saat peneliti melakukan observasi, peneliti sempat berkeliling ke tempat-tempat di sekitar daerah Kecamatan Lembang yang bisa dibilang tidak terlalu ramai dan ke tempat yang ada sekitar perbatasan Lembang Sudang serta perbatasan Lembang Bandung di Punclut, peneliti melihat juru parkir yang ada tidak memakai atribut yang sesuai dan sama seperti juru parkir yang ada di pusat keramaian Kecamatan Lembang, dan saat peneliti mencoba parkir di kedua kawasan tersebut didapatkan bahwa juru parkir yang ada memang bukan mitra dari Dinas Perhubungan, dan ditegaskan kembali saat peneliti bertanya langsung kepada Koordinator Parkir Lembang.

d) Analisis Berdasarkan Variabel Kecenderungan Pelaksana (Sikap Implementor)

Berdasarkan teori Riant Nugroho, kecenderungan pelaksana merupakan variabel determinan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Analisis mendalam terhadap dimensi sikap para pelaksana mengungkapkan dinamika persepsi, motivasi, dan respons terhadap kebijakan pengelolaan perparkiran di Kecamatan Lembang.

dengan berbagai pemangku kepentingan, implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kecamatan Lembang

menunjukkan dinamika yang kompleks dengan variasi sikap dan komitmen yang berbeda pada setiap level struktur organisasi. Pada level pimpinan dinas, teridentifikasi komitmen kuat dan pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan. Kepala Dinas Perhubungan menunjukkan sikap tegas dan konsisten dalam penegakan aturan melalui mekanisme punishment yang jelas bagi pelaku pungutan liar, termasuk pemutusan kontrak bagi juru parkir yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran retribusi. Kebijakan punishment ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengingatkan akan tanggung jawab sebagai petugas yang diberi amanah.

Sementara itu, Kepala Bidang Teknik Prasarana mengedepankan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada pembangunan kapasitas. Beliau menekankan bahwa fokus kebijakan tidak hanya pada aspek penertiban, tetapi juga pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan parkir liar. Rencana pengembangan kapasitas melalui program pelatihan dan pembinaan bagi juru parkir menunjukkan visi jangka panjang, meskipun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dinas.

Pada tingkat koordinasi, Koordinator Parkir Lembang menunjukkan sikap proaktif, bertanggung jawab, dan berani menghadapi tantangan lapangan. Sebagai koordinator yang ditunjuk langsung oleh Dinas Perhubungan, beliau secara konsisten melakukan pengawasan langsung dan turun tangan memecahkan berbagai permasalahan operasional. Tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari gangguan preman setempat yang meminta jatah dari juru parkir hingga tekanan untuk mencapai target retribusi harian. Yang menarik, sikap tegas ini diimbangi dengan pendekatan humanis yang memahami kondisi lapangan, seperti kemampuan menyesuaikan target retribusi saat kondisi cuaca buruk yang mempengaruhi intensitas parkir masyarakat. Fleksibilitas ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap dinamika operasional di lapangan.

Pada level pelaksana lapangan, yaitu para juru parkir, terlihat komitmen terhadap aturan meskipun harus menghadapi berbagai kendala operasional yang signifikan. Mereka mengalami kesulitan dalam menagih tarif parkir yang sesuai aturan, dengan banyak pengguna yang membayar tidak lengkap atau bahkan kabur tanpa membayar sama sekali. Di balik komitmen ini, terdapat masalah motivasi yang serius akibat keterbatasan fasilitas pendukung seperti seragam yang tidak memadai dan kurangnya apresiasi terhadap kerja keras mereka. Juru parkir mengungkapkan kebutuhan akan pengakuan yang lebih nyata melalui apresiasi dan fasilitas yang layak untuk menunjang kinerja mereka.

Pada tingkat masyarakat pengguna jasa, penelitian mengungkapkan respon yang sangat beragam. Sebagian pengguna menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang sesuai aturan, sementara lainnya memiliki pengalaman negatif dengan tarif tidak resmi di tempat parkir dadakan. Yang cukup mengkhawatirkan adalah munculnya sikap apatis dan ketidakpedulian dari sebagian warga terhadap mekanisme pengelolaan parkir yang formal. Banyak pengguna yang hanya memahami kewajiban membayar tanpa pemahaman yang komprehensif tentang sistem pengelolaan parkir yang benar. Persepsi yang tidak konsisten terhadap keberadaan petugas parkir juga turut mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan.

Saat melakukan observasi, peneliti mencoba melakukan eksperimen untuk tidak membayar parkir kepada juru parkir dan menjelaskan kepada juru parkir bahwa sedang tidak memiliki uang kecil, traksi dari juru parkir pun terbilang sangat sopan karena hanya bisa bilang tidak apa-apa dan tidak menagih secara verbal. Respons ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi di tingkat pelaksana, yang mungkin disebabkan oleh pemahaman terhadap kondisi ekonomi pengguna atau bahkan ketidakberdayaan dalam menegakkan aturan secara konsisten. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan

dalam sistem penegakan disiplin retribusi, dimana juru parkir cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan pengguna.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Lembang belum mencapai tingkat optimalitas yang diharapkan. Berbagai temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi yang tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2019 dengan realitas praktik di lapangan.

Beberapa faktor kunci yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan antara lain: (1) Koordinasi dan kelembagaan yang masih lemah, khususnya terkait fragmentasi kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi serta tidak adanya forum koordinasi khusus untuk wilayah Lembang; (2) Kapasitas sumber daya yang terbatas, baik dari segi kualitas SDM maupun kecukupan infrastruktur parkir off-street; (3) Dominannya ekonomi informal yang ditunjukkan oleh maraknya parkir liar yang dikelola kelompok masyarakat tanpa izin; dan (4) Variasi sikap dan kepatuhan di kalangan pelaksana dan masyarakat pengguna jasa.

Meskipun Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai inovasi seperti pengembangan aplikasi OM JUKI dan pelatihan SDM, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan. Realisasi retribusi parkir yang masih di bawah 50% dari potensi ideal mencerminkan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi wilayah Lembang sebagai destinasi wisata utama.

Secara teoritis, penelitian ini mengkonfirmasi relevansi teori Riant Nugroho dalam menganalisis implementasi kebijakan, sekaligus mengungkap keterbatasannya dalam menghadapi kompleksitas dinamika lapangan, khususnya terkait pengaruh kekuatan-kekuatan informal dan non-state actors dalam proses implementasi kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik yang mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal, serta sosialisasi kebijakan yang lebih intensif dan transparan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. (t.thn.).*

*Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah.*

*Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*